

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;

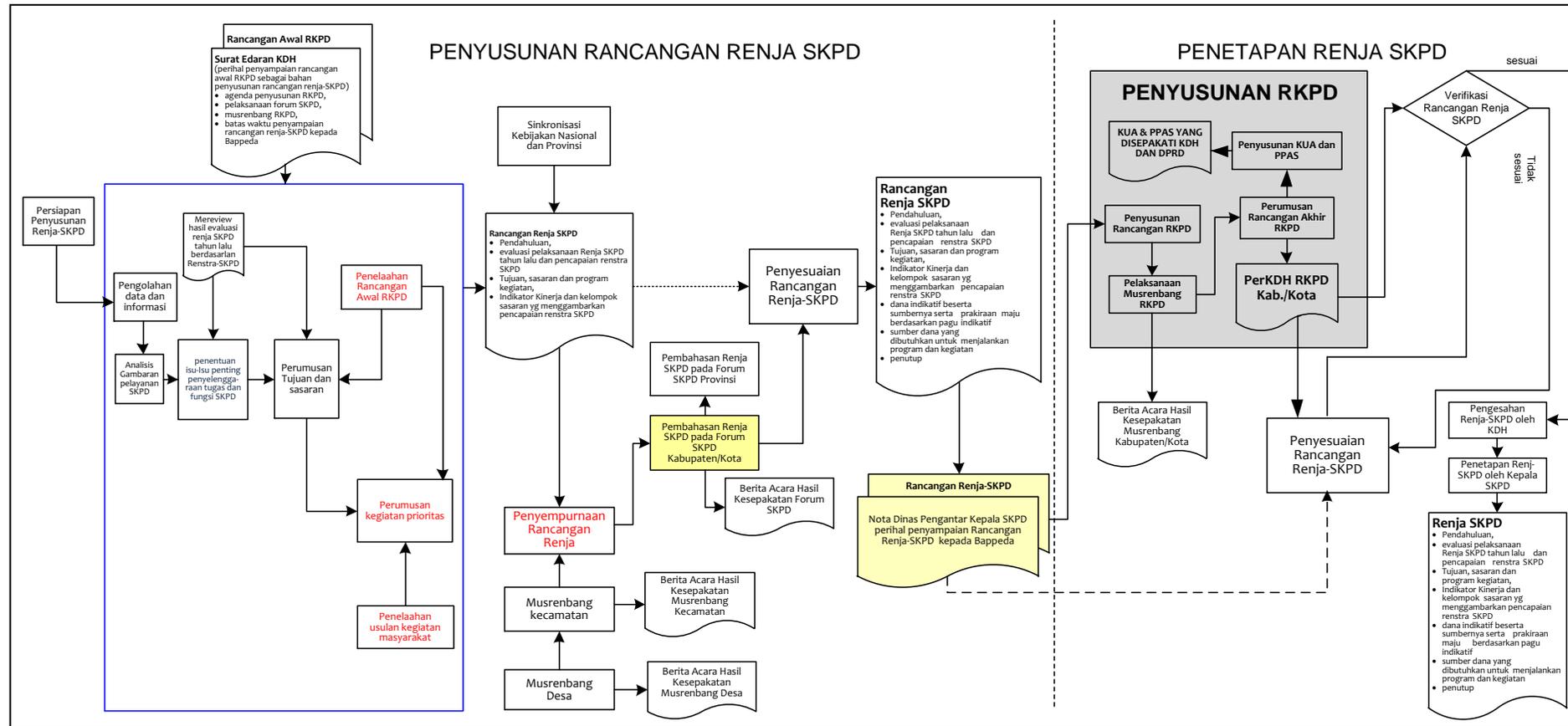
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah, mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
2. Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

Secara rinci bagan alir tahapan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan pada skema tahapan bagan alir penyusunan Renja Perangkat Daerah pada Gambar 1.1.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permenkes 43 tahun 2016 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama setahun

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).

2. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator SPM dan Indikator IKK
3. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa pada tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dibawah.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Angka Kematian Ibu, target 20,56/100.000 KH capaian 150,15/100.000 KH
- Cakupan Desa UCI, target 93% capaian 86,36%
- Akreditasi Puskesmas, belum dilaksanakan
- Cakupan *Universal Health Coverage*, target 100%, capaian 73%
- Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan, target 100% capaian 98,28%
- Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, target 100%, capaian 92,89%
- Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir, target 100%, capaian 91,34%
- Cakupan D/S, target 92%, capaian 41,4%
- Cakupan kelurahan/desa siaga aktif, target 70% capaian 12,59%
- Jumlah desa/kelurahan Pemicuan STBM, target 189 desa/kelurahan capaian 173 desa/kelurahan
- Cakupan penduduk terhadap air bersih, target 91% capaian 89,76
- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 40,89%
- Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap bayi, target 100% capaian 88%
- Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 58,96%
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan Kesehatan TBC sesuai standar, target 100% capaian 29,6%
- Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, target 100% capaian 96,61%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Angka Kematian Bayi, target 4,7/1.000 KH capaian 1,5/1.000 KH (lebih kecil capaian, lebih baik)
- Prevalensi Stunting, target 14% capaian 3,11%
- Cakupan Balita gizi buruk, 0
- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, target 16,50% capaian 1,24%
- Rumah tangga PHBS, target 68,2% capaian 71,80%
- Puskesmas yang melayani pasien penduduk miskin peserta program jemkesmas, target 22 pkm, capaian 22 Puskesmas
- Tersedia MoU BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, target 1 dok, capaian 1 dok.
- Puskesmas yang telah dilatih Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), target 22 Puskesmas, capaian 22 Puskesmas
- Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas, target 22 Pkm, capaian 22 Pkm.
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam, target 100% capaian 100%.
- Cakupan puskesmas dan jaringannya yang memiliki sumberdaya Kesehatan yang berkompeten sesuai standar, target 22 Pkm capaian 22 PKm
- Jumlah Puksemas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan, target 22 Pkm capaian 22 Pkm

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM, target 66,1% capaian 78%
- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas dan jaringannya, target 22 Kecamatan capaian 23 kecamatan
- Jumlah fasilitas pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota, target 1 RS capaian 5 RS
- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, target 100%, capaian 118,58%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan antara lain :

- a. Masih kurang matangnya dalam penyusunan perencanaan untuk rencana kerja 5 tahunan sehingga target kinerja tahunan tidak dapat dicapai sesuai harapan.
- b. Masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan target kinerja sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target kinerjanya.
- c. Masih terdapatnya keterbatasan tenaga dan anggaran pada beberapa kegiatan sehingga tidak semua target yang direncanakan dapat dilaksanakan
- d. Masih lemahnya koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan yang bisa disandingkan pada saat yang bersamaan, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan, misalnya pada pelaksanaan pertemuan atau sosialisasi program.
- e. Terjadinya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain:

Terdapat kesesuaian antara rencana yang disusun pada Renstra dengan apa yang direncanakan pada Renja dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Faktor-faktor penyebab target kinerja program / kegiatan yang melebihi target antara lain:

Merupakan kegiatan yang sangat banyak dibutuhkan seperti pelatihan dan diklat, serta melakukan promosi di bidang kesehatan

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Ada beberapa program yang tidak tercapai target kinerja program dan ini berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Pada bagian lain, ada beberapa program yang mencapai target dan berimplikasi positif terhadap status kesehatan masyarakat yang

semakin baik, selain itu pencapaian beberapa target Renstra menunjukkan pembangunan kesehatan berjalan dengan baik.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab antara lain:
 - a. Sosialisasi Program dan kegiatan ke masyarakat yang lebih optimal.
 - b. Advokasi ke Stakeholder, karena pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik bila ada koordinasi dengan sektor lain.
 - c. Menambah penganggaran program / kegiatan yang tidak mencapai target.

Secara ringkas hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (Renja) dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 diuraikan sebagaimana pada tabel 2.1

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d tahun 2020
KABUPATEN MINAHASA

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|---------|---|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2019 | Realisasi Renja SKPD tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | | |
| 1.02 | Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (score 1 s.d 4) | 100% | 100% | | 100% | 100% | |
| | | | | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84,69% |
| 1 | 0201 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 100% | 77,78% | 77,78% | |
| 1 | | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 100% | 100% | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | 0201 | 02 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 100% | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 1 | 0201 | 02 | | Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100% | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 1 | 0201 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 100% | 0% | 1 Paket | 0 | 0% |
| 1 | 0201 | 02 | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK Tahun Sebelumnya) | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai | 100% | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 99,35% |
| 1 | 0201 | 02 | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK kesehatan kefarmasian) | Tersedianya peralatan gedung kantor yang diadakan | 100% | 100% | 1 Paket | | 99,73% |
| | | | | Kalibrasi Peralatan Kesehatan | | 100% | | 1 Paket | 0 | 0% |
| | | | | Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi | | 100% | | 1 Paket | 1 Paket | 98% |
| 1 | 0201 | 02 | | Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan Kesehatan Pengendalian Penyakit) | Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor | 100% | | 1 Paket | 1 Paket | 94% |
| 1 | 0201 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | 100% | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan | Indikator kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|------|---|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2019 | Realisasi Renja SKPD tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 0201 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 0 | 0% |
| 1 | 0201 | 05 | 03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1 | 0201 | 05 | | Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 06 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | |
| 1 | 0201 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | | 1keg | | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1 | 0201 | 15 | | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1 | 0201 | 15 | 01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 1 paket | 1 paket | 97,42% |
| 1 | 0201 | 15 | 07 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian) | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan | 100% | 88.77% | 1 paket | 1 paket | 92,96% |
| 1 | 0201 | 16 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | |
| 1 | 0201 | 16 | 02 | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 99,69% |
| 1 | 0201 | 16 | 09 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 91.44% |
| 1 | 0201 | 16 | | Sosialisasi Public Safety Centre (SPC) 119 | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Public Safety Centre (SPC) 119 | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 17 | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | |
| 1 | 0201 | 17 | 05 | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya | Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya | 1 keg | | | 1 Keg | 1 keg |
| 1 | 0201 | 17 | 06 | Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya | Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya | 1 keg | | 1 keg | 0 | 0% |
| 1 | 0201 | 19 | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kabupaten Sehat | | | | | |
| 1 | 0201 | 19 | 01 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 24% |
| 1 | 0201 | 19 | 02 | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat | Terlaksananya kegiatan penyuluhan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|---|--|---------|------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | 0201 | 19 | 07 | Pemberdayaan masyarakat : diskusi terarah untuk pengembangan wilayah sehat dalam rangka Kabupaten Sehat | Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat : diskusi terarah untuk pengembangan wilayah sehat dalam rangka Kabupaten Sehat | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 94% | | | |
| 1 | 0201 | 20 | | Program Perbaikan Gizi | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 20 | | Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang | Terlaksananya kegiatan Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang | 1 keg | 100% | | | | 1 keg | 1 keg | 99,19% |
| 1 | 0201 | 20 | | Pemantauan Status Gizi | Terlaksananya kegiatan Pemantauan Status Gizi | 1 keg | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 20 | | Pertemuan Pendampingan Anak Stunting dan Gizi Kurang | Terlaksananya kegiatan Pertemuan Pendampingan Anak Stunting dan Gizi Kurang | 1 keg | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 20 | | Pengendalian Stunting | Terlaksananya kegiatan Pengendalian Stunting | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 99,97% | | | |
| 1 | 0201 | 21 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 21 | | Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Terlaksananya kegiatan STBM | 25 desa | | | | | 25 desa | 25 desa | 100% |
| 1 | 0201 | 21 | 07 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Terlaksananya kegiatan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 1 keg | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 22 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 22 | 01 | Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk | Terlaksananya fogging | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 22 | 05 | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Terlaksananya pelayanan penyakit menular | 1 paket | 100% | | | | 1 keg | 1 keg | 58,93% |
| 1 | 0201 | 22 | 16 | Pembinaan Puskesmas Dalam Pengendalian TB dan Kusta | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Puskesmas Dalam Pengendalian TB dan Kusta | 1 keg | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 22 | 08 | Peningkatan Imunisasi | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Imunisasi | 1 keg | 100 | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 22 | 09 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DID Tambahan) | Terlaksananya kegiatan Workshop Layanan Komprehensif HIV Berkesinmbungan | | | | | | 1 keg | 1 keg | 36,55% |
| 1 | 0201 | 22 | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program One Health Dalam Pengendalian Penyakit Rabies | Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program One Health Dalam Pengendalian Penyakit Rabies | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 23 | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 23 | 03 | Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 96,50% | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1 | 0201 | 23 | 07 | Bimbingan Teknis Tentang Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tentang standarisasi pelayanan kesehatan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 96,91% | | | |
| 1 | 0201 | 23 | 09 | Pemutakhiran Data Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 23 | 10 | Pemutakhiran Data Profil Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Jumlah sarana/prasarana puskesmas yang diadakan dan diperbaiki | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Puskesmas Walantakan | Terbangunnya puskesmas Walantakan | 1 paket | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Puskesmas Tomposo Barat | Terbangunnya puskesmas Tomposo Barat | 1 paket | | 1 paket | 1 paket | 99,92% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|--|--|---------|------|--|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Tonsea Lama | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tonsea Lama | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Tombulu | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tombulu | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Lolah | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Lolah | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Sonder | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Sonder | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Tompaso | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Tompaso | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Kawangkoan | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Kawangkoan | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Puskesmas Pembantu Tikela | Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pembantu Tikela | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Leilem | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Leilem | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kiawa II Barat | Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kiawa II Barat | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Poskesdes Kiawa II | Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes Kiawa II | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Poskesdes Kembes | Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes Kembes | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakas | Terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakas | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Pineleng | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas dokter Puskesmas Pineleng | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Pineleng | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas perawat Puskesmas Pineleng | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas Barat | Terlaksananya Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas Barat | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas | Terlaksananya Pembangunan Pagar Puskesmas Kakas | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tateli | Terlaksananya pembangunan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tateli | 1 paket | 100% | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Puskesmas Tompaso Barat | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Tompaso Barat | 1 pkm | | | 1 pkm | 1 pkm | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Tateli | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tateli | 1 pkm | | | 1 pkm | 1 pkm | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Manembo | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Manembo | 1 pkm | | | 1 pkm | 1 pkm | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Rumah Jabatan Dokter Puskesmas Kombi | Terlaksananya Pembangunan Rumah Jabatan Dokter Puskesmas Kombi | 1 paket | | | 1 paket | 1 paket | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas Tateli | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas Tateli | 1 paket | | | 1 paket | 1 paket | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 25 | Penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Koya | Terlaksananya Penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Koya | 1 paket | | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Tandengan | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan | 1 pkm | | | | | | 1 pkm | 1 pkm | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | Rehabilitasi Puskesmas Papakelan | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan | 1 pkm | | | | | | 1 pkm | 1 pkm | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|---|--|---------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kawangkoan Barat | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Lolah | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Lolah | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pineleng | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pineleng | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kakas | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kakas | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kombi | Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Kombi | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 25 | | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 14,87% |
| 1 | 0201 | 25 | | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan | 1 paket | | | | | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1 | 0201 | 28 | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 28 | 01 | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan | 100% | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 28 | 11 | Jaminan Kesehatan Daerah | Tersedianya Jaminan Kesehatan Daerah | 100% | 100% | 1 paket | 1 paket | 89,90% | 1 paket | 1 paket | 87,86% |
| 1 | 0201 | 28 | 12 | Workshop Pengelolaan JKN | Terlaksananya kegiatan Workshop Pengelolaan JKN | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 29 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 29 | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1 keg | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 30 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 30 | 01 | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan | 1 keg | 100% | 1 keg | 1 keg | 47% | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1 | 0201 | 32 | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 32 | 06 | Peningkatan Kewaspadaan Ibu Hamil Terhadap Resiko Kehamilan, Persalinan dan Nifas AMP | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Ibu Hamil Terhadap Resiko Kehamilan, Persalinan dan Nifas AMP | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 32 | 07 | Penanganan Kasus Ibu Hamil dan Anak Dengan Rujukan Gawat Darurat di Puskesmas | Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus Ibu Hamil dan Anak Dengan Rujukan Gawat Darurat di Puskesmas | 1 keg | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 18 | | Program Jaminan Kesehatan Nasional | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 18 | 01 | Kapitasi JKN Puskesmas Koya | Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Koya | 100% | 96,84% | 1.809.795.472 | 1.415.850.294 | 78,23% | 1.921.789.623 | 1.206.761.075 | 62,79% |
| 1 | 0201 | 18 | 02 | Kapitasi JKN Puskesmas Tonsea Lama | Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Tonsea Lama | 100% | 54,67% | 863.762.838 | 489.761.151 | 56,70% | 861.979.700 | 385.272.888 | 44,70% |
| 1 | 0201 | 18 | 03 | Kapitasi JKN Puskesmas Papakelan | Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Papakelan | 100% | 97,96% | 890.757.763 | 687.537.164 | 77,19% | 892.642.630 | 594.897.281 | 66,64% |
| 1 | 0201 | 18 | 04 | Kapitasi JKN Puskesmas Tandengan | Jumlah dana kapitasi yang diterima pkm Tandengan | 100% | 85,24% | 874.902.675 | 669.084.267 | 76,48% | 818.382.321 | 542.599.480 | 66,30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|--|---|-------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 0201 | 18 | 05 | Kapitasi JKN Puskesmas Kombi | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kombi | 100% | 87.45% | 785.275.656 | 526.130.663 | 67% | 827.327.530 | 547.083.805 | 66,13% |
| 1 | 0201 | 18 | 06 | Kapitasi JKN Puskesmas Seretan | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Seretan | 100% | 90.72% | 522.166.380 | 377.588.951 | 72,31% | 516.728.330 | 341.333.099 | 66,06% |
| 1 | 0201 | 18 | 07 | Kapitasi JKN Puskesmas Kakas | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kakas | 100% | 82.22% | 894.182.308 | 610.909.124 | 68,32% | 882.130.947 | 518.529.150 | 58,78% |
| 1 | 0201 | 18 | 07 | Kapitasi JKN Puskesmas Kakas Barat | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kakas Barat | 100% | | | | | 791.755.700 | 431.336.798 | 54,45% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Remboken | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Remboken | 100% | 89.60% | 961.910.300 | 536.509.075 | 55,78% | 900.000.000 | 607.815.525 | 67,54% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Wolaang | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Wolaang | 100% | 79.62% | 989.006.557 | 814.996.413 | 82,41% | 36.000.000 | 712.622.300 | 72,35% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Manembo | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Manembo | 100% | 78.25% | 506.716.857 | 362.001.656 | 71,44% | 531.371.020 | 365.823.404 | 68,85% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Walantakan | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Walantakan | 100% | 67.59% | 645.289.725 | 429.062.299 | 66,49% | 643.904.674 | 375.554.950 | 58,32% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Tumaratas | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tumaratas | 100% | 93.20% | 992.882.232 | 902.119.925 | 90,86% | 992.735.887 | 703.461.025 | 70,86% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Tompaso | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tompaso | 100% | 104.36% | 1.089.585.877 | 797.218.478 | 73,17% | 1.083.593.316 | 779.847.675 | 71,97% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan | 100% | 72.39% | 1.002.248.351 | 1.091.957.422 | 108,95% | 1.000.000.000 | 971.409.180 | 97,14% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Sonder | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Sonder | 100% | 86.76% | 1.141.511.822 | 813.258.967 | 71,24% | 1.264.369.000 | 1.024.856.781 | 81,06% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Loloh | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Loloh | 100% | 89.39% | 791.979.528 | 723.486.656 | 91,35% | 780.000.000 | 491.144.420 | 62,97% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Tanawangko | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tanawangko | 100% | 93.76% | 1.200.419.057 | 985.035.455 | 82,06% | 1.204.192.142 | 736.235.895 | 61,14% |
| 1 | 0201 | 18 | | Kapitasi JKN Puskesmas Tateli | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tateli | 100% | 84.32% | 1.076.015.897 | 759.552.414 | 70,59% | 1.168.722.101 | 590.595.938 | 50,53% |
| | | | | Kapitasi JKN Puskesmas Pineleng | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Pineleng | 100% | 88.51% | 1.138.096.288 | 1.165.733.753 | 102,43% | 1.191.976.279 | 986.243.381 | 82,74% |
| | | | | Kapitasi JKN Puskesmas Tombulu | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Tombulu | 100% | 76.32% | 1.088.739.665 | 864.643.625 | 79,42% | 1.093.036.681 | 512.233.906 | 48,86% |
| | | | | Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan Barat | Jumlah dana kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan Barat | 100% | - | 562.716.000 | 193.733.230 | 34,43% | 562.716.000 | 336.305.000 | 59,76% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Wolaang | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Wolaang | 100% | 2.76% | 60.000.000 | 35.900.000 | 59,83% | 36.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Tompaso | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Tompaso | 100% | 6.42% | 140.000.000 | 42.920.000 | 30,66% | 97.320.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Kawangkoan | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Kawangkoan | 100% | 10.04% | 150.000.000 | 37.740.000 | 25,16% | 90.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Sonder | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Sonder | 100% | | 10.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Tanawangko | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Tanawangko | 100% | 2.77% | 50.000.000 | 10.340.000 | 20,68% | 30.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Pineleng | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Pineleng | 100% | 1.33% | 30.000.000 | 21.000.000 | 70% | 18.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Remboken | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Remboken | 100% | | | | | | | |
| | | | | Non Kapitasi JKN Puskesmas Kakas | Jumlah dana non kapitasi yang diterima Pkm Kakas | 100% | 4.67% | 60.000.000 | 9.360.000 | 15,60% | 51.360.000 | 0 | 0% |
| 1 | 0201 | 19 | | Program Akreditasi Puskesmas | | | | | | | | | |
| | | | | Akreditasi Puskesmas | Terlaksananya Akreditasi Puskesmas | 1 keg | 100% | 2.682.232.000 | 2.319.159.502 | 86,46% | 2.896.143.565 | 1.482.653.500 | 51,19% |
| | | | | Sosialisasi Akreditasi Puskesmas | Terlaksananya sosialisasi akreditasi puskesmas | 1 keg | 100% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 20 | | Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) | | | | | | | | | |
| | | | | Jaminan Persalinan | Tersedianya jaminan persalinan | 1 keg | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 96,29% | 1 Paket | 1 Paket | 67,74% |
| 1 | 0201 | 36 | 03 | Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 36 | 01 | BOK Puskesmas Kakas | Jumlah dana BOK Puskesmas Kakas | 100% | 79.29% | 990.000.000 | 857.731.300 | 86,64% | 915.316.250 | 806.776.750 | 88,14% |
| 1 | 0201 | 36 | 02 | BOK Puskesmas Loloh | Jumlah dana BOK Puskesmas Loloh | 100% | 71.76% | 990.000.000 | 577.550.071 | 86,20% | 616.400.000 | 495.651.050 | 80,41% |
| 1 | 0201 | 36 | 03 | BOK Puskesmas Sonder | Jumlah dana BOK Puskesmas Sonder | 100% | 78.14% | 670.000.000 | 746.931.000 | 83,92% | 818.800.000 | 729.295.000 | 89,07% |
| 1 | 0201 | 36 | 04 | BOK Puskesmas Tandengan | Jumlah dana BOK Puskesmas Tandengan | 100% | 79.18% | 890.000.000 | 412.711.500 | 57,72% | 657.800.000 | 373.672.400 | 56,81% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|--|---|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 0201 | 36 | 05 | BOK Puskesmas Tompaso | Jumlah dana BOK Puskesmas Tompaso | 100% | 82.82% | 715.000.000 | 1.034.951.000 | 98,25% | 969.151.000 | 953.426.100 | 98,38% |
| 1 | 0201 | 36 | 06 | BOK Puskesmas Papakelan | Jumlah dana BOK Puskesmas Papakelan | 100% | 78.38% | 1.053.425.000 | 638.545.000 | 78,83% | 745.200.000 | 550.723.000 | 73,90% |
| 1 | 0201 | 36 | 07 | BOK Puskesmas Kakas Barat | Jumlah dana BOK Puskesmas Kakas Barat | 100% | 82.41% | 810.000.000 | 538.406.000 | 75,83% | 653.936.000 | 516.506.000 | 78,98% |
| 1 | 0201 | 36 | 08 | BOK Puskesmas Seretan | Jumlah dana BOK Puskesmas Seretan | 100% | 76% | 710.000.000 | 404.616.200 | 68,58% | 542.800.000 | 350.345.000 | 64,54% |
| 1 | 0201 | 36 | 09 | BOK Puskesmas Kombi | Jumlah dana BOK Puskesmas Kombi | 100% | 83.68% | 590.000.000 | 526.419.900 | 63,42% | 763.600.000 | 579.909.500 | 75,94% |
| 1 | 0201 | 36 | 10 | BOK Puskesmas Koya | Jumlah dana BOK Puskesmas Koya | 100% | 77.90% | 830.000.000 | 885.099.800 | 91,06% | 903.960.000 | 869.650.000 | 96,20% |
| 1 | 0201 | 36 | 11 | BOK Puskesmas Tumaratas | Jumlah dana BOK Puskesmas Tumaratas | 100% | 69.48% | 972.000.000 | 572.003.400 | 78,14% | 680.760.000 | 481.562.100 | 70,74% |
| 1 | 0201 | 36 | 12 | BOK Puskesmas Kawangkoan Barat | Jumlah dana BOK Puskesmas Kawangkoan Barat | 100% | 82.99% | 732.000.000 | 473.739.000 | 66,96% | 657.975.000 | 596.018.451 | 90,58% |
| 1 | 0201 | 36 | 13 | BOK Puskesmas Kawangkoan | Jumlah dana BOK Puskesmas Kawangkoan | 100% | 77.22% | 707.500.000 | 918.950.000 | 92,64% | 922.560.000 | 879.206.500 | 95,30% |
| 1 | 0201 | 36 | 14 | BOK Puskesmas Manembo | Jumlah dana BOK Puskesmas Manembo | 100% | 63.44% | 992.000.000 | 352.438.400 | 50,33% | 651.255.750 | 413.604.000 | 63,51% |
| 1 | 0201 | 36 | 15 | BOK Puskesmas Tateli | Jumlah dana BOK Puskesmas Tateli | 100% | 77.88% | 700.275.000 | 417.412.250 | 55,65% | 697.500.000 | 440.219.500 | 63,11% |
| 1 | 0201 | 36 | 16 | BOK Puskesmas Tonsea Lama | Jumlah dana BOK Puskesmas Tonsea Lama | 100% | 67.93% | 750.000.000 | 442.018.346 | 63,07% | 651.000.000 | 461.335.000 | 70,87% |
| 1 | 0201 | 36 | 17 | BOK Puskesmas Remboken | Jumlah dana BOK Puskesmas Remboken | 100% | 59.49% | 700.800.000 | 343.854.600 | 58,78% | 544.050.000 | 485.320.102 | 89,21% |
| 1 | 0201 | 36 | 18 | BOK Puskesmas Pineleng | Jumlah dana BOK Puskesmas Pineleng | 100% | 70.24% | 585.000.000 | 708.155.075 | 69,63% | 945.810.000 | 713.227.900 | 75,41% |
| 1 | 0201 | 36 | 19 | BOK Puskesmas Tanawangko | Jumlah dana BOK Puskesmas Tanawangko | 100% | 59.16% | 770.000.000 | 510.466.000 | 66,29% | 716.100.000 | 459.142.700 | 64,12% |
| 1 | 0201 | 36 | 20 | BOK Puskesmas Walantakan | Jumlah dana BOK Puskesmas Walantakan | 100% | 77.50% | 700.000.000 | 439.748.125 | 62,82% | 651.000.000 | 421.425.000 | 64,74% |
| 1 | 0201 | 36 | 21 | BOK Puskesmas Wolaang | Jumlah dana BOK Puskesmas Wolaang | 100% | 75.03% | 852.000.000 | 546.007.000 | 64,09% | 792.360.000 | 584.638.500 | 73,78% |
| 1 | 0201 | 36 | 22 | BOK Puskesmas Tombulu | Jumlah dana BOK Puskesmas Tombulu | 100% | 70.99% | 802.000.000 | 525.783.968 | 65,56% | 745.860.000 | 499.878.280 | 67,02% |
| 1 | 0201 | 36 | 23 | BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan | Jumlah dana Dukungan Manajemen yang diterima | 100% | 92.94% | | | | 94.461.707 | 50.496.900 | 53,46% |
| | | | | BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan | BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan | 100% | | 1.206.000.000 | 1.056.814.900 | 87,63% | 1.609.164.296 | 1.410.513.601 | 87,66% |
| | | | | BOK Distribusi Obat dan E-Logistik | BOK Distribusi Obat dan E-Logistik | 100% | | 276.733.000 | 136.915.000 | 49,48% | 110.767.000 | 95.040.000 | 85,80% |
| | | | | BOK Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal Dinas Kesehatan | BOK Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal Dinas Kesehatan | 100% | | 1.039.000.000 | 755.414.360 | 72,71% | | | |
| | | | | Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid - 19 | Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid - 19 | 100% | | | | | 8.918.287.172 | 8.918.287.172 | 100% |
| 1 | 0201 | 37 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 37 | 01 | Gerakan Masyarakat Sehat Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) | Terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) | 1 keg | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 37 | 02 | Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Bagi Wanita Usia Subur | Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Bagi Wanita Usia Subur | 1 keg | 100% | | | | | | |
| 1 | 0201 | 37 | 03 | Workshop penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular | Terlaksananya kegiatan Workshop penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 37 | 04 | Screening Pencegahan kanker leher rahim | Terlaksananya kegiatan Screening Pencegahan kanker leher rahim | 1 keg | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |
| 1 | 0201 | 38 | | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1 | 0201 | 38 | 01 | Peningkatan Penyelenggaraan Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi Tenaga Kesehatan | | | 1 keg | 1 keg | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|--|---|--|--|-------|---|----|--|--|--|
| 1 | 0201 | 38 | 02 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan | | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 38 | 03 | Workshop Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan Workshop Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan | | | 1 keg | 0 | 0% | | | |
| 1 | 0201 | 38 | 04 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Pembangunan | Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Pembangunan | | | 1 keg | 0 | 0% | | | |

1

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa, disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana dalam pasal 2 point a dan b, IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, juga diukur dengan mempergunakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

| No | Indikator | SPM/ Standard Nas. (%) | IKK (%) | Target (%) | | | | Realisasi Capaian (%) | | Proyeksi (%) | | Catatan Analisis |
|-----|--|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | | 16/1.000 KH | 5.35/1.000 KH | 4.9/1.000 KH | 4.7/1.000 KH | 4.5/1.000 KH | 5.35/1.000 KH | 4.9/1.000 KH | 4.7/1.000 KH | 4.5/1.000 KH | |
| 2 | Angka kelangsungan hidup bayi | | 984 | 994.65 | 995.1 | 995.3 | 995.5 | 994.65 | 995.1 | 995.3 | 995.5 | |
| 3 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | | 6.58 | 6.58 | 6 | 5 | 5 | 6.58 | 6 | 5 | 5 | |
| 4 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | | 9/1.000 KH | 9/1.000 KH | 8/1.000 KH | 7/1.000 KH | 6/1.000 KH | 9 | 8/1.000 KH | 7/1.000 KH | 6/1.000 KH | |
| 5 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | | 232 | 61.7/100.000 KH | 41/100.000 KH | 20.56/100.000 KH | 17/100.000 KH | 61.7/100.000 KH | 41/100.000 KH | 20.56/100.000 KH | 17/100.000 KH | |
| 6 | Prevalensi Stunting Balita | | 22 | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | |
| 7 | Prevalensi wasting balita | | 7 | 10% | 9.5% | 9% | 8% | 10% | 9.5% | 9% | 8% | |
| 8. | Rasio posyandu per satuan balita | | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 12.7 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | |
| 9. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | 12.41 | 12.41 | 12.45 | 12.47 | 12.5 | 12.41 | 12.45 | 12.47 | 12.5 | |
| 10. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | |
| 11. | Rasio dokter per satuan penduduk | | | | | | | | | | | |
| 12. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--|
| 13. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | 87% | 87% | 90% | 92% | 94% | 87% | 90% | 92% | 94% | |
| 14. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | 94.79% | 94.79% | 95% | 96% | 97% | 94.79% | 95% | 96% | 97% | |
| 15. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | 91.10% | 91.10% | 92% | 93% | 94% | 91.10% | 92% | 93% | 94% | |
| 16. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 92% | 93% | 94% | 95% | |
| 18. | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | | ≥2 | 2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
| 19. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 20. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | | 40.33% | 40.33% | 41% | 42% | 43% | 40.33% | 41% | 42% | 43% | |
| 21. | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | 190 | 144 | 143 | 142 | 141 | 144 | 143 | 142 | 141 | |
| 22. | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 23. | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | | 87 | 87 | 90 | 91 | 92 | 87 | 90 | 91 | 92 | |
| 24. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 26. | Penderita diare yang ditangani | | 91.08% | 91.08% | 92% | 93% | 94% | 91.08% | 92% | 93% | 94% | |
| 27. | Angka kejadian Malaria | | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | <1‰ | |
| 28. | Tingkat kematian akibat malaria | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 29. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | | 0.37% | 0.37% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.37% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | |
| 30. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 31. | Cakupan kunjungan bayi | | 83% | 83% | 85% | 90% | 90% | 83% | 85% | 90% | 90% | |
| 32. | Cakupan puskesmas | | 88% | 88% | 92% | 96% | 100% | 88% | 92% | 96% | 100% | |
| 33. | Cakupan pembantu puskesmas | | 15.56% | 15.56% | 22.96% | 26.67% | 33.33% | 15.56% | 22.96% | 26.67% | 33.33% | |
| 34. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | | 85% | 85% | 87% | 90% | 93% | 85% | 87% | 90% | 93% | |
| 35. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% | | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 36. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 80% | 85% | 95% | 95% | |
| 37. | Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | 65.80% | 65.80% | 100% | 100% | 100% | 65.80% | 100% | 100% | 100% | |
| 38. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | | 100% | 20% | 25% | 30% | 35% | 20% | 25% | 30% | 35% | |
| 39. | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 40. | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 41. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 42. | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--|
| 43. | Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif | | 71.11% | 71.11% | 60% | 70% | 80% | 71.11% | 60% | 70% | 80% | |
| 44. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 45. | Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 46. | Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 47. | Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 48. | Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 49. | Persentase penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 50. | Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 51. | Persentase Orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 52. | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100% | | n/a | 100% | 100% | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan juga memiliki permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan secara lebih detail diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (diluar kewenangan P. Daerah) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | |
| 1. Pelayanan Kesehatan Dasar | Terpenuhinya akses pelayanan kesehatan berkualitas dan aman | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Belum meratanya petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya |
| | Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Kondisi ibu hamil dengan status gizi Kurang Energi Kronis (KEK) Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memadai terutama pada proses persalinan Faktor Determinan (Perilaku ibu hamil yang tidak melakukan ANC, masih tingginya penyakit infeksi berbasis lingkungan) |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Status Gizi bukan hanya tergantung pada sector kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain |
| 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan | Terpenuhinya jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu dengan biaya negara | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelnya khususnya dlm pelayanan kesehatan rujukan |
| 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB | Menurunnya insiden penyakit menular. | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Adanya <i>re-emerging diseases</i> dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang |
| | Terwujudnya lingkungan yang sehat | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan |
| 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Tumbuhnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat | SPM Bidang Kesehatan (berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | Kapasitas SDM Bidang Kesehatan | Dukungan Sektor/kelembagaan terkait | Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah |

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah maka permasalahan-permasalahan yang ditemui, sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Belum meratanya petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya.

Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memadai terutama pada proses persalinan.

Faktor Determinan (Perilaku ibu hamil yang tidak melakukan ANC, masih tingginya penyakit infeksi berbasis lingkungan).

b. Status Gizi bukan hanya tergantung pada sektor kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain.

c. Pelayanan kesehatan rujukan

Masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanannya khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan.

d. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB; Kesehatan Lingkungan

Adanya *re-emerging diseases* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang. Disamping itu kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya kesehatan lingkungan. Selain itu juga disadari bahwa proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Sebagian besar sumber daya tenaga promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas merupakan tenaga kontrak yang mempunyai latar belakang pendidikan bukan tenaga promosi kesehatan, mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola program PHBS dan mengembangkan UKBM. Meskipun program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipegang oleh tenaga ASN (dari berbagai disiplin ilmu), namun mereka rangkap jabatan dengan program lain, mengakibatkan program promosi dan pemberdayaan masyarakat tidak dikelola secara maksimal.

Masih adanya pemikiran dan orientasi pelayanan di Puskesmas dari penanggungjawab Puskesmas bukan mengutamakan Promotif dan Preventif sehingga mengakibatkan sebagian besar kegiatan di Puskesmas tidak mengutamakan pelayanan di luar gedung.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

a. *Peluang dan Tantangan Eksternal*

1) Peluang Eksternal

Kelembagaan : Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.

Sumber Daya : Antara lain : a). kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bidan dan dokter; b). memfasilitasi Program Pendidikan Tenaga Medis; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; d). adanya organisasi profesi kesehatan; dan e). adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat.

Pembiayaan : Terdapat bantuan anggaran dari dunia usaha/masyarakat.

2) Tantangan Eksternal

Kelembagaan : Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk *stakeholder* belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah.

Pembiayaan : Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum **tumbuh** dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan

pemeliharaan kesehatannya. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.

Budaya : Budaya masyarakat berhubungan dengan gaya hidup masyarakat setempat termasuk gaya hidup kesehatan setiap orang. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.

b. Kelemahan dan Kekuatan Internal

1) Kelemahan Internal

Kelembagaan : Struktur organisasi Dinas kesehatan yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi belum seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Tenaga kesehatan profesi (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitarian) masih kurang kuantitas termasuk distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabkan penempatan tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang. Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih (tenaga yang sudah pernah dilatih, mengalami mutasi).

Pembiayaan : Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri, selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan

prioritas kesehatan. Proporsi anggaran masih lebih besar untuk kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.

2) Kekuatan Internal

Kelembagaan : Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program-program kesehatan yang ada di masyarakat.

Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana) : Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui jasa pihak ketiga seperti tenaga promkes, tenaga honor lepas . Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD maupun APBN. Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran bantuan pemerintah provinsi dan Dana Alokasi Khusus.

Pembiayaan : terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi).

4. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

Berikut diuraikan isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan, yaitu:

a. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Pada era reformasi dan desentralisasi ini, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan sudah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang muncul terkait dengan isu pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan muncul

dalam pelaksanaan penjangkauan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu :

- Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan di tingkat desa, pemenuhan ambulance dan puskesmas keliling juga pemenuhan sarana kesehatan rujukan.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan *performance*, ketrampilan petugas pelayanan dan melalui penilaian kualitas pelayanan dengan akreditasi puskesmas.
- Peningkatan pemerataan petugas kesehatan ke seluruh desa khususnya daerah sulit dijangkau disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa baik dari sisi pembiayaannya maupun kemudahan dalam pemberian pelayanan melalui program Jamkesda sebagai pendamping dari program Jamkesmas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanannya khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan.

c. **Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Komponen perilaku dan lingkungan sehat merupakan garapan utama promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya (WHO). Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena menyangkut aspek, perilaku yang erat kaitannya dengan sikap, kebiasaan, pengetahuan, pendidikan, kemampuan, potensi dan faktor-faktor budaya pada umumnya yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan.

Perilaku masyarakat yang dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

d. **Pengendalian penyakit berbasis lingkungan**

Peningkatan lingkungan sehat merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan derajat kesehatan dimana menurut teori HL. Bloom, lingkungan merupakan 40% penyebab dari masalah-masalah kesehatan. Hal ini didukung dengan adanya keinginan masyarakat agar ada upaya-upaya yang prioritas dilakukan untuk peningkatan pemenuhan sarana sanitasi dasar dan kualitas lingkungan ini, sehingga penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan dapat dieliminir.

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan diantaranya yaitu ketersediaan air bersih bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, penyediaan jamban keluarga dan juga rumah sehat.

Kondisi perumahan yang layak dan sehat akan memberikan dampak yang positif terhadap status kesehatan, karena faktor pencahayaan, kelembaban maupun kepadatan hunian memiliki hubungan terhadap potensi penularan beberapa penyakit. Intervensi dalam penyehatan perumahan dan lingkungan pemukiman bukan menjadi tugas dari Dinas Kesehatan saja tetapi merupakan tugas bersama lintas sektoral secara terintegrasi.

e. Gizi buruk dan revitalisasi posyandu

Dalam upaya penanganan masalah gizi buruk, diperlukan adanya keterkaitan dengan sektor/bidang lain khususnya dalam pencegahan sebelum kasus gizi buruk terjadi. Kasus gizi buruk dapat teridentifikasi lebih dini melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, namun kendala yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita datang secara rutin setiap bulan hal ini bisa dilihat dari capaian penimbangan balita yang belum mencapai 100%. Berkaitan dengan itu maka revitalisasi posyandu menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga fungsinya akan semakin meningkat. Selain itu pemenuhan dan peningkatan kemampuan kader juga perlu terus dilakukan sebagai pelaksana posyandu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, diuraikan sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Minahasa

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---------------|---|----------------|-------------------------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kab. Minahasa | Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (Skore 1 s.d 4) | 3 | 710.003.500 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kab. Minahasa | Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor (Skore 1 s.d 4) | 3 | 710.003.500 | |
| | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | | Terpenuhinyakebutuhanpelayananadmi nistrasiperkantoran | 1 paket | | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | | Terpenuhinyakebutuhanpelayananadmi nistrasiperkantoran | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Tingkat pematuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 80.00% | 3.400.000.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Tingkat pematuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 80.00% | | |
| | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Kab. Min | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 2 paket | 837.121.600 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Kab. Min | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 2 paket | 837.121.600 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab. Min | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | 53.350.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab. Min | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | 53.350.000 | |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Kab. Min | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | 1 Paket | 2.470.000.000 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Kab. Min | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | 1 Paket | 2.470.000.000 | |
| | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Kab. Min | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | | 682.000.000 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | Kab. Min | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Kesehatan Pelayanan Dasar) | | 682.000.000 | |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Kesehatan Kefarmasian) | Kab. Min | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kab. Min | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 1 Paket | 274.500.000 | |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Tahun sebelumnya) | Kab. Min | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 1 Paket | 243.944.000 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Tahun sebelumnya) | Kab. Min | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 1 Paket | 243.944.000 | |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan kesehatan Pengendalian Penyakit) | Kab. Min | Jumlah halaman gedung farmasi yang tertata | 1 Paket | 3.867.230.674 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK Penugasan kesehatan Pengendalian Penyakit) | Kab. Min | Jumlah halaman gedung farmasi yang tertata | 1 Paket | 3.867.230.674 | |
| | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | Kab. Min | Cakupan Ketersediaan 97 Jenis Obat di Puskesmas sesuai standard obat generik nasional | 95,00% | 2.600.000.000 | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | | Cakupan Ketersediaan 97 Jenis Obat di Puskesmas sesuai standard obat generik nasional | 95,00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|---------------|-----------------------|---|----------|--|---------------|----------------------|--|
| | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Kab. Min | Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia | 1 paket | 100.000.000 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Kab. Min | Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia | 1 paket | 100.000.000 | |
| | Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian) | Kab. Min | Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia | 1 paket | 1.663.338.000 | Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAK Kesehatan Kefarmasian) | Kab. Min | Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia | 1 paket | 1.663.338.000 | |
| | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Kab. Min | Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED | >10 | 3.711.040.986 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Kab. Min | Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED | >10 | 3.711.040.986 | |
| | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Kab. Min | Jumlah orang yang menerima bantuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | 25 desa/ke | 125.000.000 | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Kab. Min | Jumlah orang yang menerima bantuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | 25 desa/ke | 125.000.000 | |
| | Revitalisasi sistem Kesehatan | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan revitalisasi system kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | Revitalisasi sistem Kesehatan | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan revitalisasi system kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | |
| | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Kab. Min | Jumlah tenaga jasa medic yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | 1 Paket | 3.556.920.986 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Kab. Min | Jumlah tenaga jasa medic yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | 1 Paket | 3.556.920.986 | |
| | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Kab. Min | Jumlah penanganan kasus keracunan obat | 100% | 210.052.000 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Kab. Min | Jumlah penanganan kasus keracunan obat | 100% | 210.052.000 | |
| | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Kab. Min | Terlaksananya peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | 1 paket | 175.552.000 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Kab. Min | Terlaksananya peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | 1 paket | 175.552.000 | |
| | Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya | 1 paket | 34.500.000 | Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya | 1 paket | 34.500.000 | |
| | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kab. Min | Rasio posyandu per satuan balita | 1,26 | 800.000.000 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | Rasio posyandu per satuan balita | 1,26 | | |
| | Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Kab. Min | Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 1 paket | 12.000.000 | Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Kab. Min | Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 1 paket | 12.000.000 | |
| | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | Prevalensi Stunting Balita | 14% | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | Prevalensi Stunting Balita | 14% | | |
| | Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang | Kab. Min | Tersedianya data pemetaan gizi | 1 dok | 378.025.000 | Pemetaan Deteksi Dini Stunting dan Gizi Kurang | Kab. Min | Tersedianya data pemetaan gizi | 1 dok | 378.025.000 | |
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Kab. Min | | | 2.150.000.000 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS | 100,00% | | |
| | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1 keg | 59.120.000 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1 keg | 59.120.000 | |
| | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi | >5 | 29.120.000 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi | >5 | | |
| | Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan | | Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan | | Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | |
| | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | | Ratio puskesmas, poliklinik, pustu/satuan penduduk | 7,7 | 10.466.012.000 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | | Ratio puskesmas, poliklinik, pustu/satuan penduduk | 7,7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|--|
| | Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tondano Selatan | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) | 1 paket | 3.200.000.000 | Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tondano Selatan | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Koya (Penambahan ruangan) | 1 paket | 3.200.000.000 | |
| | Rehabilitasi Puskesmas Papakelan (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tondano Timur | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan | 1 paket | 1.166.012.000 | Rehabilitasi Puskesmas Papakelan (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tondano Timur | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Papakelan | 1 paket | 1.166.012.000 | |
| | Rehabilitasi Puskesmas Tandengan (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Eris | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan | 1 paket | 500.000.000 | Rehabilitasi Puskesmas Tandengan (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Eris | Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Tandengan | 1 paket | 500.000.000 | |
| | Rumah Dinas Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kombi | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi | 1 paket | 600.000.000 | Rumah Dinas Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kombi | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kombi | 1 paket | 600.000.000 | |
| | Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kawangkoan Barat | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | 600.000.000 | Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kawangkoan Barat | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | 600.000.000 | |
| | Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tombariri | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko | 1 paket | 1.300.000.000 | Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Tombariri | Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tanawangko | 1 paket | 1.300.000.000 | |
| | IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kawangkoan Barat | Tersedianya IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | 500.000.000 | IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kawangkoan Barat | Tersedianya IPAL Puskesmas Kawangkoan Barat | 1 paket | 500.000.000 | |
| | IPAL Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kombi | Tersedianya IPAL Puskesmas Kombi | 1 paket | 500.000.000 | IPAL Puskesmas Kombi (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kombi | Tersedianya IPAL Puskesmas Kombi | 1 paket | 500.000.000 | |
| | IPAL Puskesmas Loloh (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Loloh | Tersedianya IPAL Puskesmas Loloh | 1 paket | 500.000.000 | IPAL Puskesmas Loloh (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Loloh | Tersedianya IPAL Puskesmas Loloh | 1 paket | 500.000.000 | |
| | IPAL Puskesmas Pineleng (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Pineleng | Tersedianya IPAL Puskesmas Pineleng | 1 paket | 500.000.000 | IPAL Puskesmas Pineleng (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Pineleng | Tersedianya IPAL Puskesmas Pineleng | 1 paket | 500.000.000 | |
| | IPAL Puskesmas Kakas (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kakas | Tersedianya IPAL Puskesmas Kakas | 1 paket | 500.000.000 | IPAL Puskesmas Kakas (DAK Pelayanan Dasar) | Kec. Kakas | Tersedianya IPAL Puskesmas Kakas | 1 paket | 500.000.000 | |
| | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa | Kec. Mandolang | Terlaksananya rehab pustu Mokupa | 1 paket | 500.000.000 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mokupa | Kec. Mandolang | Terlaksananya rehab pustu Mokupa | 1 paket | 500.000.000 | |
| | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan | Kec. Tombulu | Terlaksananya rehab pustu Suluan | 1 paket | 150.000.000 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Suluan | Kec. Tombulu | Terlaksananya rehab pustu Suluan | 1 paket | 150.000.000 | |
| | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | > 80% | 36.231.355.000 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | > 80% | 36.231.355.000 | |
| | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | Kab. Min | Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan | > 80% | 36.231.355.000 | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | Kab. Min | Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan | > 80% | 36.231.355.000 | |
| | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | Cakupan posyandu lansia (puskesmas) | 20,00% | 29.120.000 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | Cakupan posyandu lansia (puskesmas) | 20,00% | 29.120.000 | |
| | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan | 1 keg | 29.120.000 | |
| | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 94,50% | 29.120.000 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 94,50% | 29.120.000 | |
| | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Kab. Min | Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 1 keg | 29.120.000 | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 1 keg | 29.120.000 | |
| | Program Akreditasi Puskesmas | | | | 2.896.143.565 | Program Akreditasi Puskesmas | | | | 2.896.143.565 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|
| | Akreditasi Puskesmas | Kab. Min | Puskesmas yang ter akreditasi | 6 pkm akre dan 4 pkm re-akre | 2.896.143.565 | Akreditasi Puskesmas | | Puskesmas yang ter akreditasi | 6 pkm akre dan 4 pkm re-akre | 2.896.143.565 | |
| | Program Jaminan Persalinan | | Persentase Ibu melahirkan yang mendapatkan Jampersal | >90% | 712.405.000 | Program Jaminan Persalinan | | Persentase Ibu melahirkan yang mendapatkan Jampersal | >90% | 712.405.000 | |
| | Jaminan persalinan | Kab. Min | Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan jampersal | 100% | 712.405.000 | Jaminan persalinan | Kab. Min | Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan jampersal | 100% | 712.405.000 | |
| | Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | | | 100% | 26.975.874.175 | Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | | | 100% | 26.975.874.175 | |
| | BOK Puskesmas Kakas | Pkm Kakas | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 915.316.250 | BOK Puskesmas Kakas | Pkm Kakas | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 915.316.250 | |
| | BOK Puskesmas Lolah | Pkm Lolah | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 616.400.000 | BOK Puskesmas Lolah | Pkm Lolah | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 616.400.000 | |
| | BOK Puskesmas Sonder | Pkm Sonder | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 818.800.000 | BOK Puskesmas Sonder | Pkm Sonder | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 818.800.000 | |
| | BOK Puskesmas Tandengan | Pkm Tandengan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 657.800.000 | BOK Puskesmas Tandengan | Pkm Tandengan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 657.800.000 | |
| | BOK Puskesmas Tompaso | Pkm Tompaso | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 969.151.000 | BOK Puskesmas Tompaso | Pkm Tompaso | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 969.151.000 | |
| | BOK Puskesmas Papakelan | Pkm Papakelan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 745.200.000 | BOK Puskesmas Papakelan | Pkm Papakelan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 745.200.000 | |
| | BOK Puskesmas Kakas Barat | Pkm Kakas Barat | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 653.936.000 | BOK Puskesmas Kakas Barat | Pkm Kakas Barat | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 653.936.000 | |
| | BOK Puskesmas Seretan | Pkm Seretan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 542.800.000 | BOK Puskesmas Seretan | Pkm Seretan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 542.800.000 | |
| | BOK Puskesmas Kombi | Pkm Kombi | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 763.600.000 | BOK Puskesmas Kombi | Pkm Kombi | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 763.600.000 | |
| | BOK Puskesmas Koya | Pkm Koya | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 903.960.000 | BOK Puskesmas Koya | Pkm Koya | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 903.960.000 | |
| | BOK Puskesmas Tumaratas | Pkm Tumas | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 680.760.000 | BOK Puskesmas Tumaratas | Pkm Tumas | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 680.760.000 | |
| | BOK Puskesmas Kawangkoan Barat | Pkm Kawangkoan Barat | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 657.975.000 | BOK Puskesmas Kawangkoan Barat | Pkm Kawangkoan Barat | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 657.975.000 | |
| | BOK Puskesmas Kawangkoan | Pkm Kawangkoan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 922.560.000 | BOK Puskesmas Kawangkoan | Pkm Kawangkoan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 922.560.000 | |
| | BOK Puskesmas Manembo | Pkm Manembo | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.255.750 | BOK Puskesmas Manembo | Pkm Manembo | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.255.750 | |
| | BOK Puskesmas Tateli | Pkm Tateli | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 697.500.000 | BOK Puskesmas Tateli | Pkm Tateli | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 697.500.000 | |
| | BOK Puskesmas Tonselama | Pkm Tonselama | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.000.000 | BOK Puskesmas Tonselama | Pkm Tonselama | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|-------|---------------|--|----------------|--|-------|---------------|--|
| | BOK Puskesmas Remboken | Pkm Remboken | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 544.050.000 | BOK Puskesmas Remboken | Pkm Remboken | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 544.050.000 | |
| | BOK Puskesmas Pineleng | Pkm Pineleng | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 945.810.000 | BOK Puskesmas Pineleng | Pkm Pineleng | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 945.810.000 | |
| | BOK Puskesmas Tanawangko | Pkm Tanawangko | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 716.100.000 | BOK Puskesmas Tanawangko | Pkm Tanawangko | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 716.100.000 | |
| | BOK Puskesmas Walantakan | Pkm Walantakan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.000.000 | BOK Puskesmas Walantakan | Pkm Walantakan | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 651.000.000 | |
| | BOK Puskesmas Wolaang | Pkm Wolaang | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 792.360.000 | BOK Puskesmas Wolaang | Pkm Wolaang | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 792.360.000 | |
| | BOK Puskesmas Tombulu | Pkm Tombulu | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 745.860.000 | BOK Puskesmas Tombulu | Pkm Tombulu | Jumlah Dana BOK yang diterima | 100% | 745.860.000 | |
| | BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan | Kab. Minahasa | Tersedianya Manajemen Dinas Kesehatan | 1 dok | 94.461.707 | BOK Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan | Kab. Minahasa | Tersedianya Manajemen Dinas Kesehatan | 1 dok | 94.461.707 | |
| | BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan | Kab. Minahasa | Tersedianya UKM Sekunder Dinas Kesehatan | 1 dok | 1.609.164.296 | BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan | Kab. Minahasa | Tersedianya UKM Sekunder Dinas Kesehatan | 1 dok | 1.609.164.296 | |
| | BOK Distribusi Obat dan e-logistik | Kab. Minahasa | Tersedianya obat dan Logistik | 1 dok | 110.767.000 | BOK Distribusi Obat dan e-logistik | Kab. Minahasa | Tersedianya obat dan Logistik | 1 dok | 110.767.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maka beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat, baik yang diperoleh dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, serta hasil-hasil konsultasi publik terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan telaahan dokumen-dokumen perencanaan khususnya yang terkait dengan penanaman modal maka hasilnya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Minahasa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sosialisasi dan Penyuluhan | Kab. Minahasa | 1 keg penyuluhan | 1 | diterima |
| 2 | Pengadaan alat fogging di desa | Kab. Minahasa | Alat fogging tersedia | 5 | Pengadaan dari dana desa |
| 3 | Pengadaan obat-obatan khusus Corona/desinfektan untuk desa | Kab. Minahasa | | | Diusahakan dalam penganggaran |
| 4 | Tenaga perawat yang menetap di Puskesmas | Kel. Masarang | | | Sudah ada jadwal petugas dari Puskesmas untuk pustu Masarang |
| 5 | Sosialisasi pencegahan penyakit menular | Kel. Masarang | | | Disesuaikan dengan kegiatan di dinkes |
| 6 | Penambahan tenaga paramedic/ bidan yang ada di Poskesdes | Desa Toliang kec. Kakas Barat | | | Sudah ada 2 bidan tapi pelayanan di Simbel |
| 7 | Penambahan tenaga bidan di Puskesmas | Puskesmas Tandengan | | | Tenaga bidan do puskesmas sudah mencukupi |
| 8 | Renovasi Pustu | Kab. Minahasa | | | Akan didiskusikan |
| 9 | Pemeliharaan gedung Puskesmas | Kab. Minahasa | | | Akan didiskusikan |
| 10 | Posyandu Lansia | Kec Langowan Utara | | 2 | Diterima akan disampaikan kepada Puskesmas ybs |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran pembangunan kesehatan berdasarkan pada RPJMN Teknokratik 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan & Meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk.

Arah Kebijakan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Kabupaten Minahasa, diantaranya yaitu :

1. Akses pelayanan dalam hal ini keterjangkauan dan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
3. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih relative tinggi;
4. Masih adanya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang;

5. Meningkatnya kejadian penyakit. Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masih merupakan penyebab penyakit tertinggi.
6. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, berdasarkan kondisi lingkungan dan permukiman sehat masih rendah.

Isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa adalah Terbatasnya sumberdaya dan pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular dan terdapat penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan, Angka kematian ibu dan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2020, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa dapat menyentuh sasaran yang tepat. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa untuk **Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing** (Misi 2) perlu Meningkatkan Pembangunan Kesehatan (Tujuan Misi 2). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Minahasa menetapkan sasaran yang akan dicapai salah satunya adalah “Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Minahasa antara lain:

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
(sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019)

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | Catatan penting | Prakiraan maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|---|--|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | pagu Indikatif | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif |
| | | | | Kinerja | | | Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 1 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | |
| 1 | 02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 50.951.177.986 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 50.951.177.986 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 45.129.339 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 39.477.610 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5.651.729 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 54.116.100 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.06 05 Pengadaan Mebel | Kab. Minahasa | | 54.116.100 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Minahasa | | 1.000.000 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Minahasa | | 63.207.000 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Minahasa | | 4.225.800.000 | | | |
| 1 | 02 | 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 119.600.000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------------------|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 119.600.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | 113.762.526.677 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar) | Kab. Minahasa, Tondano Barat, Rinegetan Kab. Minahasa, Remboken, Leleko Kab. Minahasa, Tombulu, Kembes II Kab. Minahasa, | 12.998.944.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar) | Kawangkoan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Lolah Kab. Minahasa | 1.998.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK- Pelayanan Kesehatan Dasar) | | 2.259.999.997 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar) | Kab. Minahasa | 12.544.378.647 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan) | Kab. Minahasa | 1.459.801.820 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan) | Kab. Minahasa | 1.614.252.573 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK Non Fisik) | Kab. Minahasa | 1.004.538.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Walantakan | 643.904.674 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Pineleng | 1.160.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Sonder | 1.160.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tonsea lama | 861.979.700 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tandengan | 799.999.978 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tombulu | 1.083.222.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Kombi | 777.584.064 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Lembean Timur | 481.905.952 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Kakas Barat | 791.755.700 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tumaratas | 977.523.750 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|----------------------|----------------|--|--|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tombariri | 1.194.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Papakelan | 889.896.344 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Kawangkoan | 1.060.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Remboken | 900.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Wolaang | 1.070.906.400 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Manembo | 494.265.800 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Kawangkoan Barat | 562.716.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Koya | 1.600.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Lolah | 780.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Kakas | 906.882.816 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tateli | 1.075.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pkm Tompasso | 1.135.448.800 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda) | Kab. Minahasa | 39.278.813.804 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Walantakan | 651.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Pineleng | 940.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Sonder | 818.800.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tonsea lama | 650.999.987 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tandengan | 651.799.993 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tombulu | 739.999.970 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Kombi | 723.763.380 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Lembean Timur | 534.306.250 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Kakas Barat | 653.936.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tumaratas | 675.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tombariri | 706.176.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Papakelan | 739.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Kawangkoan | 922.560.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Remboken | 544.050.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Wolaang | 785.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Manembo | 651.255.750 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Kawangkoan Barat | 656.998.914 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Koya | 890.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Lolah | 609.213.960 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Kakas | 909.999.206 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tateli | 697.500.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---------------|---------------|--|--|
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pkm Tompaso | 963.998.280 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kab. Minahasa | 2.623.826.406 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PMI) | Kab. Minahasa | 200.000.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kab. Minahasa | 1.257.621.762 | | |

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MINAHASA,**



**Dr. MAYA CH. RAMBITAN, M.Kes
NIP. 19800304 200902 2 005**

Dasar pertimbangan perumusan program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2021 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kesehatan sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran bidang kesehatan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Renja harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi

dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan kesehatan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan kesehatan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan

dilakukan berdasarkan RKPD tahun 2021 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, dan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan adalah Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas, mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat, meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang Berkualitas, Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan dan Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) SKPD Kabupaten Minahasa menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD serta menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dalam hal anggaran daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai rencana Kerja maka penetapan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran atau pagu yang ditetapkan tetap mengacu pada program dan kegiatan dalam Renja yang ditetapkan. Untuk penyempurnaan rancangan Renja maka program dan kegiatan didasarkan pada rancangan Renja, kecuali kalau ada kebijakan nasional atau daerah yang memungkinkan terjadinya penetapan program dan kegiatan di luar Renja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tondano, Oktober 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Minahasa



Dr. Maya C. Rambitan, M.Kes
Pembina
NIP. 19800304 200902 2 005